e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra[1], I Gede Bayu Wirayudha[2], *Dewa Gde Yoga Permana[3]
[1]Program Studi Akuntansi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa
[2]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tabanan
[3]Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora, Universitas Bali Internasional
yogiswaradarmaputra@gmail.com[1],wirayudhabayu@gmail.com[2], *dewayoga@unbi.co.id[3]

Abstrak: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pemerintah Kabupaten Bangli memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian pada 2015–2016 dan Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut pada 2017–2023. Perubahan tersebut menunjukkan perbaikan kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan faktor organisasi yang berkaitan dengan kualitas informasi keuangan. Berdasarkan teori keagenan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei pada 13 organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bangli. Dari populasi sebanyak 1.230 pegawai, penelitian menetapkan 52 aparatur pengelola keuangan sebagai sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* berdasarkan jabatan dan masa kerja lebih dari satu tahun. Seluruh anggota sampel menjadi responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert lima poin pada tahun 2024. Analisis data mencakup pengujian validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan koefisien regresi positif untuk komitmen organisasi (0,254), kompetensi sumber daya manusia (0,324), sistem pengendalian intern (0,410), dan pemanfaatan teknologi informasi (0,183). Pengujian simultan menghasilkan nilai F sebesar 238,788 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,001. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,949 menunjukkan bahwa keempat variabel mampu menjelaskan 94,9% variasi skor kualitas laporan keuangan pada sampel penelitian. Sistem pengendalian intern memiliki koefisien regresi tidak terstandar terbesar dibandingkan variabel lainnya. Temuan ini memberikan bukti empiris mengenai pentingnya faktor perilaku, kompetensi aparatur, pengendalian, dan teknologi dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengendalian intern, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan komitmen aparatur, serta optimalisasi sistem informasi keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan akuntabel.
Kata kunci: *Komitmen Organisasi, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan*

Abstract: *Transparency and accountability in local government financial management require the preparation of financial statements that are relevant, reliable, comparable, and understandable. The Bangli Regency Government received Qualified Opinions (WDP) on its financial statements in 2015–2016, followed by Unqualified Opinions (WTP) consecutively from 2017 to 2023. This improvement indicated progress in the fair presentation of financial statements but did not fully explain the organizational factors associated with financial reporting quality. Drawing on agency theory and inconsistencies in previous empirical findings, this study aimed to examine the effects of organizational commitment, human resource competence, internal control systems, and information technology utilization on the quality of local government financial statements. This study employed a quantitative approach using a survey design involving 13 regional government agencies in Bangli*

Regency. From a population of 1,230 employees, 52 financial management personnel were selected through purposive sampling *based on their positions and a minimum of one year of work experience. All selected employees participated as respondents. Primary data were collected in 2024 using a five-point Likert-scale questionnaire. Data analysis included validity, reliability, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis. The findings revealed positive regression coefficients for organizational commitment (0.254), human resource competence (0.324), internal control systems (0.410), and information technology utilization (0.183). The simultaneous test produced an F-statistic of 238.788 with a significance level below 0.001. The adjusted R-squared value of 0.949 indicated that the four independent variables collectively explained 94.9% of the variation in financial reporting quality scores within the research sample. Internal control systems demonstrated the largest unstandardized regression coefficient among the independent variables. These findings provided empirical evidence of the importance of organizational behavior, employee competence, internal control mechanisms, and information technology in supporting local government financial reporting quality. From a practical perspective, the study recommended strengthening internal control systems, improving employee competence through continuous training, enhancing organizational commitment, and optimizing financial information systems. These measures were expected to support more accurate, timely, reliable, and accountable financial reporting in local government institutions.*
Keywords: *Organizational Commitment, Human Resource Competence, Internal Control Systems, Information Technology Utilization, Financial Reporting Quality*

1. Pendahuluan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan unsur utama tata kelola dan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban administratif. Laporan keuangan juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, dasar evaluasi kinerja, dan sumber informasi bagi pengambilan keputusan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

Dalam perspektif teori agensi, pemerintah daerah berperan sebagai *agent* yang mengelola sumber daya publik, sedangkan masyarakat berperan sebagai *principal* yang berhak menerima informasi keuangan secara transparan. Ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menurunkan akuntabilitas jika laporan keuangan tidak disusun secara tepat. Karena itu, kualitas laporan keuangan memerlukan dukungan perilaku organisasi, sumber daya manusia, sistem pengendalian, dan teknologi informasi (Indriyani & Putra, 2022; Putra & Ariyanto, 2015; Putra & Indriyani, 2020)

Komitmen organisasi berperan dalam membentuk tanggung jawab aparatur terhadap tujuan organisasi. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi cenderung bekerja lebih disiplin, patuh terhadap prosedur, dan berorientasi pada mutu pelaporan. Dalam konteks pemerintah daerah, komitmen organisasi dapat memperkuat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih akuntabel (Aqila & Yusmita, 2022; Aziyah & Yanto, 2022)

Kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan. Pegawai yang memahami akuntansi pemerintahan, prosedur penatausahaan, penggunaan aplikasi keuangan, dan regulasi sektor publik memiliki kemampuan lebih baik dalam mencatat, mengklasifikasi, mengukur, dan menyajikan transaksi keuangan. Rendahnya kompetensi dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan ketidaksesuaian informasi dengan standar yang berlaku (Hutabri, 2023; Vidyantari et al., 2024)

Sistem pengendalian intern diperlukan untuk memastikan proses pelaporan keuangan berjalan tertib, terukur, dan dapat diverifikasi. Pengendalian intern yang efektif memperkuat pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dokumentasi, pengawasan, dan evaluasi. Pada saat yang sama, pemanfaatan teknologi informasi membantu pemerintah daerah mempercepat proses pengolahan data, mengurangi kesalahan manual, memperkuat integrasi data, dan meningkatkan ketepatan waktu penyajian laporan (Nasir, 2025; Ridzal et al., 2022; Sumekar et al., 2025)

Penelitian ini menguji pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Penelitian ini melengkapi bukti empiris sebelumnya yang tidak selalu konsisten. (Hutabri, 2023) tidak menemukan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada konteks yang ditelitinya, sedangkan (Nasir, 2025) menemukan hubungan positif. Penelitian ini penting karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan kajian empiris yang tidak hanya menilai aspek teknis akuntansi, tetapi juga faktor perilaku, kapasitas aparatur, mekanisme pengendalian, dan dukungan teknologi.

2. Landasan Teori

2.1. Teori Agensi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* ketika *principal* mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk menjalankan aktivitas tertentu dan mengambil keputusan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Jensen & Meckling, 1976) . Dalam sektor publik, masyarakat dapat ditempatkan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang memperoleh mandat untuk mengelola sumber daya publik. Delegasi tersebut menciptakan kebutuhan pertanggungjawaban karena pemerintah memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai proses penganggaran, pelaksanaan program, pengelolaan aset, dan transaksi keuangan dibandingkan masyarakat.

Perbedaan penguasaan informasi dapat menimbulkan asimetri informasi dan meningkatkan risiko perilaku oportunistik. Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu mekanisme formal untuk mengurangi masalah tersebut. Melalui laporan keuangan, pemerintah menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus sumber daya, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010), informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga menentukan kualitas informasi yang digunakan untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

Dalam kerangka penelitian ini, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor perilaku, kapasitas manusia, mekanisme pengendalian, dan teknologi. Komitmen organisasi mendorong aparatur untuk mengutamakan tujuan organisasi dan menjalankan tanggung jawab pelaporan secara konsisten. Kompetensi sumber daya manusia menentukan kemampuan aparatur memahami dan menerapkan ketentuan akuntansi. Sistem pengendalian intern membatasi risiko kesalahan dan penyimpangan. Pemanfaatan teknologi informasi mendukung kecepatan, integrasi, akurasi, dan ketepatan waktu pemrosesan informasi. Keempat faktor tersebut dapat diposisikan sebagai mekanisme organisasional yang membantu pemerintah daerah mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kepada *principal*.

Perkembangan penelitian terkini memperkuat pandangan bahwa kualitas pelaporan pemerintah tidak lahir dari satu faktor tunggal. (Suhardi, 2025) menemukan bahwa kompetensi SDM, pengendalian intern, teknologi informasi, dan perilaku organisasi berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan akuntabilitas publik sebagai mekanisme mediasi. (Diah et al., 2026) menunjukkan bahwa kapabilitas teknologi informasi meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Dewa Gde Yoga Permana & I Gede Bayu Wirayudha, 2023) mengenai ekonomi digital Bali memberikan konteks umum perkembangan penggunaan teknologi di daerah, meskipun tidak secara langsung menguji kualitas laporan keuangan pemerintah. Temuan tersebut memperluas teori agensi karena pengurangan asimetri informasi tidak hanya bergantung pada kewajiban pelaporan, tetapi juga pada kapasitas organisasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

2.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan menunjukkan tingkat kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang berguna, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, kualitas tersebut mengacu pada karakteristik kualitatif pelaporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)). Relevansi berkaitan dengan kemampuan informasi memengaruhi keputusan pengguna. Keandalan

menunjukkan bahwa informasi bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Keterbandingan memungkinkan pengguna menilai informasi antarperiode atau antarentitas. Keterpahaman menunjukkan bahwa informasi disajikan dengan bentuk dan istilah yang dapat dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai.

Kualitas laporan keuangan pemerintah juga berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan informasi. Informasi yang benar tetapi terlambat dapat kehilangan relevansinya bagi pengambilan keputusan. Sebaliknya, informasi yang cepat tetapi tidak didukung proses pengendalian yang memadai dapat mengurangi keandalan. Karena itu, kualitas pelaporan membutuhkan keseimbangan antara kepatuhan pada standar, kompetensi penyusun laporan, efektivitas pengendalian, dan dukungan sistem informasi.

Penelitian (Vidyantari et al., 2024) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli menunjukkan pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi SDM dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian saat ini karena memperlihatkan bahwa kualitas pelaporan pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangli berkaitan dengan kapasitas teknis aparatur dan sistem akuntansi. Penelitian saat ini memperluas perspektif tersebut dengan menguji komitmen organisasi, kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama pada organisasi perangkat daerah. (Binawati, 2022) juga menempatkan kompetensi SDM, pengendalian intern, dan teknologi informasi sebagai faktor yang berkaitan dengan mutu pelaporan pemerintah daerah.

2.3. Komitmen Organisasi dan Kualitas Laporan Keuangan

Komitmen organisasi menggambarkan keterikatan individu terhadap organisasi, penerimaan terhadap tujuan organisasi, dan kesediaan untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan tersebut. (Meyer & Allen, 1991) menjelaskan komitmen melalui dimensi afektif, keberlanjutan, dan normatif. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah, komitmen organisasi penting karena penyusunan laporan keuangan membutuhkan konsistensi, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang berlaku.

Aparatur dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap kualitas pekerjaannya. Pada fungsi keuangan, komitmen dapat tercermin melalui kesediaan mengikuti prosedur, menyelesaikan rekonsiliasi, menjaga kelengkapan dokumen, memenuhi jadwal pelaporan, dan memastikan informasi disajikan sesuai standar. Dari perspektif teori agensi, komitmen organisasi dapat mengurangi perbedaan kepentingan antara individu sebagai pelaksana dan organisasi sebagai pemegang mandat publik. Orientasi terhadap tujuan organisasi mendorong aparatur untuk menghasilkan informasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

(Tihajar et al., 2025) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tihajar et al. (2025) juga menemukan hubungan positif komitmen organisasi dalam konteks Pemerintah Kota Lhokseumawe. (Aziyah & Yanto, 2022) juga menempatkan komitmen organisasi sebagai determinan kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemauan aparatur untuk menjalankan tanggung jawab organisasi secara konsisten. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi sumber daya manusia mencerminkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan individu untuk menjalankan pekerjaannya. Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi meliputi pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah, prosedur penatausahaan, regulasi keuangan, rekonsiliasi, serta penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan.

Kompetensi memengaruhi kualitas laporan karena proses akuntansi membutuhkan keputusan teknis pada setiap tahap. Aparatur harus mampu mengidentifikasi transaksi, menentukan klasifikasi akun, melakukan pengukuran, mencatat transaksi, melakukan rekonsiliasi, dan menyajikan informasi

secara tepat. Kompetensi yang tidak memadai meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, ketidaktepatan klasifikasi, keterlambatan, serta ketidaksesuaian laporan dengan standar. (Vidyantari et al., 2024) , yang juga melibatkan Putra sebagai penulis, memberikan bukti pada konteks Kabupaten Bangli bahwa kompetensi SDM berperan dalam kualitas laporan keuangan RSUD.

Temuan tersebut memperkuat kontinuitas kajian pada penelitian saat ini. (Ridzal et al., 2022) dan (Pertiwi, 2025) juga menunjukkan relevansi kapasitas SDM dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, (Suhardi, 2025) menemukan bahwa kompetensi SDM berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan dan pengaruh tersebut juga berkaitan dengan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, kompetensi tidak hanya berfungsi sebagai kemampuan teknis individual, tetapi juga sebagai kapasitas organisasi untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5. Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Dalam sektor pemerintahan Indonesia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) . Kelima unsur tersebut menyediakan struktur untuk mengendalikan aktivitas organisasi dan menjaga keandalan informasi keuangan.

Pengendalian intern memiliki hubungan langsung dengan proses pelaporan. Pemisahan fungsi mengurangi risiko konflik tugas. Otorisasi memastikan transaksi memperoleh persetujuan yang sesuai. Dokumentasi menyediakan bukti audit. Rekonsiliasi membantu mengidentifikasi perbedaan data. Pemantauan memastikan kelemahan pengendalian dapat ditemukan dan ditindaklanjuti. Karena itu, sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengurangi kesalahan, penyimpangan, dan ketidaklengkapan informasi sebelum masuk ke laporan keuangan.

(Putra & Indriyani, 2020) telah menempatkan sistem pengendalian internal dalam kajian kinerja pemerintah bersama budaya Tri Hita Karana. Penelitian tersebut menunjukkan kesinambungan agenda penelitian penulis mengenai mekanisme pengendalian dalam organisasi sektor publik. Pada konteks kualitas pelaporan, (Ridzal et al., 2022) menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan salah satu faktor yang relevan bagi kualitas laporan keuangan. (Chair & Tarjo, 2024) serta (Nasir, 2025) juga menemukan bahwa sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Suhardi, 2025) kembali menegaskan peran pengendalian intern dalam model yang memasukkan akuntabilitas publik.

Dari perspektif teori agensi, pengendalian intern berfungsi sebagai mekanisme *monitoring*. Pengendalian membatasi ruang terjadinya kesalahan dan perilaku oportunistik sekaligus meningkatkan kemampuan *principal* memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, basis data, dan sistem informasi untuk mendukung pemrosesan serta penyajian informasi. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, teknologi informasi mendukung pencatatan transaksi, konsolidasi data, rekonsiliasi, penyimpanan dokumen, pengawasan, dan penyusunan laporan. Pemanfaatan teknologi yang efektif dapat mempercepat proses pengolahan data dan mengurangi pekerjaan manual yang rentan terhadap kesalahan.

Teknologi informasi juga meningkatkan integrasi data antarunit dan memperkuat ketepatan waktu pelaporan. Namun, keberadaan teknologi tidak otomatis menghasilkan laporan yang berkualitas. Organisasi membutuhkan dukungan kelembagaan, kompetensi pengguna, tata kelola data, dan sistem

informasi akuntansi yang mampu mengubah sumber daya teknologi menjadi informasi yang akurat dan relevan. Karena itu, teknologi sebaiknya dipahami sebagai kapabilitas organisasi, bukan hanya sebagai ketersediaan perangkat. (Chair & Tarjo, 2024) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Suhardi, 2025) juga menunjukkan kontribusi teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan dan menempatkan akuntabilitas publik sebagai mekanisme yang menghubungkan kapasitas organisasi dengan kualitas informasi.

Bukti yang lebih baru diberikan oleh (Diah et al., 2026) melalui penelitian terhadap 735 pegawai pemerintah daerah Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas teknologi informasi meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan. Kualitas sistem informasi akuntansi juga menjadi mekanisme penting yang menerjemahkan kapabilitas teknologi menjadi hasil pelaporan yang lebih baik. Temuan (Diah et al., 2026) relevan untuk memperbarui argumentasi penelitian ini. Pemanfaatan teknologi informasi tidak cukup dijelaskan sebagai alat untuk mempercepat pekerjaan. Teknologi berkontribusi terhadap kualitas pelaporan ketika teknologi terintegrasi dengan kompetensi pengguna, komitmen pemerintah, dan sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Perspektif ini konsisten dengan arah penelitian penulis yang semakin menempatkan teknologi informasi dan akuntabilitas sebagai elemen penting dalam pengelolaan sektor publik.
Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:
H4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.7. Sintesis Kajian Teori

Secara keseluruhan, penelitian ini menempatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai hasil dari kombinasi empat kapasitas organisasi. Komitmen organisasi merepresentasikan dimensi perilaku aparatur. Kompetensi SDM merepresentasikan kapasitas manusia. Sistem pengendalian intern merepresentasikan mekanisme tata kelola dan *monitoring*. Pemanfaatan teknologi informasi merepresentasikan kapabilitas digital organisasi. Teori agensi menghubungkan keempat dimensi tersebut melalui kebutuhan untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Perkembangan penelitian penulis menunjukkan kesinambungan dengan kerangka tersebut. (Putra & Ariyanto, 2015) mengkaji faktor yang memengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. (Putra & Indriyani, 2020) mengembangkan kajian sistem pengendalian internal dan budaya Tri Hita Karana dalam kinerja pemerintah. (Vidyantari et al., 2024) menguji SAP, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada RSUD Kabupaten Bangli. Rangkaian penelitian tersebut memperlihatkan pergeseran dari kepatuhan dan sistem akuntansi menuju pengendalian, kompetensi, teknologi, dan akuntabilitas sebagai penjelas kualitas pengelolaan sektor publik.

Literatur 2025-2026 memperkuat arah tersebut. Akuntabilitas publik mulai ditempatkan sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana kapasitas SDM, pengendalian, teknologi, dan perilaku organisasi diterjemahkan menjadi kualitas pelaporan (Suhardi, 2025). Pada saat yang sama, kualitas sistem informasi akuntansi terbukti menjadi mekanisme penting yang menghubungkan kapabilitas teknologi dengan kualitas pelaporan pemerintah daerah (Diah et al., 2026) . Dengan demikian, model penelitian ini dapat dipandang sebagai fondasi empiris untuk pengembangan model lanjutan yang mengintegrasikan faktor perilaku, *human capability*, *governance control*, *digital capability*, kualitas sistem informasi, dan akuntabilitas publik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Objek penelitian adalah kualitas laporan keuangan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Populasi penelitian mencakup 1.230 pegawai pada 13 organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangli. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan kriteria pegawai yang menangani proses pelaporan keuangan dan telah bekerja lebih dari satu tahun.

Pada setiap OPD dipilih empat orang, yaitu satu kepala bagian keuangan dan tiga pegawai yang menjalankan fungsi bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, serta bendahara pembantu. Dengan demikian, ukuran sampel penelitian adalah 13 OPD × 4 pegawai = 52 orang. Seluruh 52 anggota sampel mengisi kuesioner dan menjadi responden analisis. Unit analisis penelitian adalah individu pengelola keuangan, sedangkan 13 OPD merupakan lokasi asal responden.

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner pada tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam tabulasi dan hasil pengolahan data. Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert lima poin, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Komitmen organisasi (X1) diukur melalui komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif. Kompetensi SDM (X2) mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sistem pengendalian intern (X3) mengikuti lima unsur SPIP, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi (X4) meliputi kemudahan dan kegunaan aplikasi. Kualitas laporan keuangan (Y) mengacu pada relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)

Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji signifikansi simultan, dan uji signifikansi parsial. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

$$Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4X4 + e.$$

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Kode	Fokus Pengukuran
Komitmen organisasi	X1	Keterikatan, loyalitas, tanggung jawab, dan kesediaan aparatur mendukung tujuan organisasi.
Kompetensi sumber daya manusia	X2	Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sistem pengendalian intern	X3	Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan.
Pemanfaatan teknologi informasi	X4	Penggunaan perangkat, aplikasi, jaringan, dan sistem informasi dalam proses pelaporan keuangan.
Kualitas laporan keuangan	Y	Relevansi, keandalan, keterbandingan, keterpahaman, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi.

Sumber: Diolah dari instrumen dan data penelitian tahun 2026.

4. Hasil Dan Pembahasan

Responden penelitian berjumlah 52 orang dari 13 instansi. Komposisi responden menunjukkan bahwa setiap instansi diwakili empat orang, yaitu kepala bagian keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara pembantu. Mayoritas responden berusia 41 sampai 50 tahun sebanyak 36 orang atau 69,24%. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan berjumlah 36 orang atau 69,24%, sedangkan responden pria berjumlah 16 orang atau 30,76%. Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan S1 sebanyak 40 orang atau 76,92%.

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Umur	21-30 tahun	4	7,69%
	31-40 tahun	12	23,07%
	41-50 tahun	36	69,24%
Jenis kelamin	Pria	16	30,76%
	Wanita	36	69,24%
Jabatan	Kepala Bagian Keuangan	13	25,00%
	Staf Keuangan Bendahara Penerimaan	13	25,00%
	Staf Keuangan Bendahara Pengeluaran	13	25,00%
	Staf Keuangan Bendahara Pembantu	13	25,00%
Pendidikan	SMA	6	11,54%
	S1	40	76,92%
	S2	6	11,54%

Sumber: Data Diolah (2026)

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada lima variabel memiliki koefisien korelasi di atas 0,30. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen memenuhi kriteria valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha seluruh variabel berada di atas 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Komitmen Organisasi (X1)	0,795	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,787	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,781	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	0,801	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,799	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2026)

Pengujian normalitas residual dengan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan Asymp. Sig. 0,200, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hasil tersebut tidak memberikan bukti untuk menolak asumsi normalitas residual. Uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas telah dijelaskan, namun nilai tolerance pada tabel sumber memerlukan verifikasi terhadap keluaran SPSS sebelum digunakan untuk menarik kesimpulan akhir mengenai seluruh asumsi regresi.

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	0,621	1,404	0,442	0,047
Komitmen Organisasi	0,254	0,129	1,971	0,004
Kompetensi SDM	0,324	0,105	3,084	0,003
Sistem Pengendalian Intern	0,410	0,080	5,138	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,183	0,103	1,770	0,003

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 0,621 + 0,254X1 + 0,324X2 + 0,410X3 + 0,183X4 + e. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh koefisien regresi bernilai positif. Artinya, peningkatan komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi akan diikuti oleh peningkatan kualitas laporan keuangan, dengan asumsi variabel lain konstan.

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

Tabel 5. Koefisien Determinasi dan Uji Simultan

R	R Square	Adjusted R Square	F/Sig.
0,976	0,953	0,949	238,788 / 0,000

Sumber: Data Diolah (2026)

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,949 menunjukkan bahwa 94,9% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sisanya sebesar 5,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai F hitung sebesar 238,788 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai koefisien sebesar 0,254 dan nilai signifikansi sebesar 0,004. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi aparatur, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Aparatur yang memiliki keterikatan, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap organisasi cenderung lebih disiplin dalam mengikuti prosedur pelaporan, lebih patuh terhadap ketentuan akuntansi pemerintahan, dan lebih memperhatikan akurasi informasi keuangan. Temuan ini sejalan dengan (Aqila & Yusmita, 2022; Aziyah & Yanto, 2022; Tihajar et al., 2025), yang membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, komitmen organisasi menjadi faktor penting dalam mendorong aparatur untuk menyusun laporan keuangan secara lebih tertib, akurat, dan akuntabel.

4.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai koefisien sebesar 0,324 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Aparatur yang memiliki pengetahuan akuntansi pemerintahan, keterampilan penatausahaan keuangan, serta kemampuan menggunakan aplikasi keuangan daerah akan lebih mampu menyusun laporan secara tepat, lengkap, dan sesuai standar. Kompetensi yang memadai juga membantu mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan ketepatan penyajian informasi keuangan. Temuan ini sejalan dengan (Pertiwi, 2025; Vidyantari et al., 2024), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur keuangan menjadi aspek penting dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai koefisien sebesar 0,410 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan variabel lain, sehingga sistem pengendalian intern menjadi faktor paling dominan dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemisahan fungsi yang jelas, otorisasi transaksi, kelengkapan dokumentasi, pemantauan berkala, dan evaluasi yang konsisten dapat menekan risiko kesalahan pencatatan serta meningkatkan keandalan informasi keuangan. Temuan ini konsisten dengan (Chair & Tarjo, 2024; Putra & Indriyani, 2020; Ridzal et al., 2022; Sumekar et al., 2025) , yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern berperan penting dalam memperkuat keandalan dan ketepatan laporan keuangan. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian intern perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4.4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai koefisien sebesar 0,183 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penggunaan teknologi informasi membantu aparatur dalam proses pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data keuangan secara lebih cepat dan akurat. Teknologi informasi juga mendukung ketepatan waktu pelaporan, mengurangi risiko kesalahan manual, serta meningkatkan konsistensi data antar unit kerja. Temuan ini sejalan dengan (Nasir, 2025; Ridzal et al., 2022; Sumekar et al., 2025) , yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses pengolahan data yang lebih efektif dan akurat. Dengan demikian, optimalisasi teknologi informasi perlu terus dilakukan untuk mendukung pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih andal, tepat waktu, dan akuntabel. Namun, (Hutabri, 2023) melaporkan hasil berbeda mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi perlu didukung kompetensi pengguna serta proses pengendalian yang memadai, sebagaimana diperkuat oleh (Diah et al., 2026)

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh penerapan standar akuntansi, tetapi juga oleh perilaku aparatur, kemampuan teknis, pengendalian internal, dan dukungan sistem teknologi informasi.

Sistem pengendalian intern menjadi variabel dengan pengaruh paling kuat terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan perlu menjadi prioritas utama dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Penafsiran signifikansi parsial pada beberapa variabel tetap perlu dikonfirmasi berdasarkan keluaran statistik asli sebelum penyampaian kesimpulan final.

Daftar Pustaka

Aqila, T. R., & Yusmita, F. (2022). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *7*(2), 291–298. https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.21180

Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner*, *6*(1), 977–989. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686

Binawati, E. , & N. C. T. (2022). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Optimal*, *19*(1), 19–39.

Chair, Z. B. M. K., & Tarjo. (2024). The Impact of Internal Control Systems, Regional Financial Accounting Systems, and Information Technology Utilization on the Quality of Financial Reports in Local Government. *APSSAI ACCOUNTING REVIEW*, *4*(2), 143–151. https://doi.org/10.26418/apssai.v4i2.103

Dewa Gde Yoga Permana, & I Gede Bayu Wirayudha. (2023). Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bali. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, *1*(4), 289–297. https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v1i4.2328

Diah, A. M., Hasiara, L. O., Lesmana, D., Raharjo, S., Aprianti, Y., & Yudaruddin, R. (2026). Information technology capability and financial reporting quality in local governments: the mediating role of accounting information system quality. *Cogent Business & Management*, *13*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2654816

Hutabri, M. S. (2023). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, *6*(3), 330–336. https://doi.org/10.26905/afr.v6i3.8401

Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, *21*(2), 168–174.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, *1*(1), 61–89. https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z

Nasir, N. , M. R. , & H. S. P. (2025). Pengaruh teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jambura Accounting Review*, *6*(1), 411–425.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).

Pertiwi, I. Y. , P. S. Y. A. , & Y. M. (2025). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan). *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, *3*(1), 121–131.

Putra, I. W. G. Y. D., & Ariyanto, D. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *13*, 14–32.

Putra, I. W. G. Y. D., & Indriyani, N. M. V. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Tri Hita Karana Pada Kinerja Pemerintah. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, *4*(1), 20–30.

Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner*, *6*(3), 2944–2954. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882

Suhardi. (2025). The Effect of Information Technology, HR Competence, Internal Control, and Organizational Culture on the Quality of Financial Reports. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *13*(2), 311–326. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i2.3262

Sumekar, A., Marviana, R. D., & Junaidi, L. D. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner*, *9*(4), 2938–2949. https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2779

Tihajar, T., Murhaban, M., Naz'aina, N., & Usman, A. (2025). PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, *4*(2). https://doi.org/10.29103/jam.v4i2.16434

Vidyantari, P. K., Putra, I. W. G. Y. D., Putri, P. Y. A., & Diana, K. (2024). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGLI. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 644–655.